

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan(*Agency Theory*)

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan yang terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) yang bertindak sebagai pemegang saham dengan pihak manajemen yang dalam hal ini bertindak sebagai agen. Hal tersebut yang menjadikan pemilik perusahaan untuk mempercayakan segala wewenangnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan pekerjaan dengan atas nama pemilik perusahaan. Pada praktiknya sering terjadinya konflik di dalam perusahaan yang disebut *agency conflict* disebabkan oleh hubungan antara *principal* atau dalam hal ini sebagai pemberi kontrak/pemegang saham dengan agen atau dalam hal ini sebagai penerima kontrak dan pengelola dan *principal*, mempunyai kepentingan yang berbeda. Apabila agen dan *principal* berupaya untuk memaksimalkan manfaatnya masing-masing, serta mempunyai motivasi dan keinginan yang berbeda, maka akan ada alasan untuk dapat menumbuhkan kepercayaan bahwa manajemen atau agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan *principal* atau pemegang saham hingga timbul biaya keagenan (*Agency Cost*). Biaya keagenan adalah biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya

perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. (Jensen & Meckling, 1976)membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan *principal* (Perdana, 2014).

2.2. Good Corporate Governance

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian didalam perusahaan menimbulkan masalah dari *Good Corporate Governance*. Pemisahan ini didasarkan pada Teori Keagenan (*Agency Teory*) yang dalam hal ini manajemen akan mengarah pada peningkatan keuntungan pribadinya dibandingkan dengan pencapaian dari tujuan perusahaan (Ulfa & Asyik, 2018). Pengertian *Good Corporate Governance* menurut (Puspitasari, 2019) adalah sebuah struktur, sistem, dan proses yang difungsikan oleh seluruh organ di dalam perusahaan sebagai upaya dalam memberikan nilai tambah perusahaan secara kontinu untuk jangka panjang.

Menurut (Andypratama & Mustamu, 2013)*Good Corporate Governance* adalah suatu struktur yang mengikutsertakan berbagai pihak untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga menghasilkan sebuah tata kelola

perusahaan yang baik. Namun *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai sistem proses dari input serta output, dimana dengan adanya sistem maka bila terdapat penyimpangan dapat segera diproses dan diselesaikan.

Berdasarkan pengertian *Good Corporate Governance* tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur dan proses yang digunakan perusahaan sebagai upaya dalam peningkatan nilai tambah perusahaan guna kepentingan para pemegang saham yang berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Adapun manfaat yang diperoleh dengan menerapkan *good corporate governance* (FCGI, 2001) :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* (pemegang saham)
2. Mempermudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan, karena sekaligus akan meningkatkan pemegang saham dan dividen.

3. Prinsip Dasar dan Asas-asas Good Corporate Governance

Untuk mendorong terciptanya pasar yang transparan, konsisten, dan efisien dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance*. Oleh karenanya, penerapan *Good Corporate Governance* memerlukan adanya penunjang oleh tiga pilar yang saling berkaitan yakni negara beserta instrumennya yang berperan sebagai regulator, dunia bisnis yang berperan sebagai pelaku dasar, dan masyarakat yang berperan sebagai pengguna produk/barang dan jasa dunia bisnis. Prinsip dasar yang wajib dilaksanakan tiap-tiap pilar berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006:3) sebagai berikut:

- 1) Negara dan instrumennya sebagai pencipta peraturan perundang-undangan yang membantu iklim usaha yang sehat, transparan dan efisien, melaksanakan peraturan tersebut dan menegakkan hukum secara konsisten.
- 2) Dunia bisnis sebagai pelaku pasar bisnis yang menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar dari pelaksanaan bisnisnya.
- 3) Masyarakat sebagai pengguna produk/barang dan jasa dunia bisnis beserta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, membuktikan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggungjawab.

Selain prinsip dasar, setiap perusahaan juga perlu memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan seluruh jajaran perusahaan. Untuk mencapai *sustainability* atau kelangsungan usaha

perusahaan, dengan memperhatikan pemangku kepentingan atau stakeholders serta asas-asas dalam penerapan *Good Corporate Governance*, berikut ini asas-asas penerapan *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) (2006:5) :

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan usaha, diperlukan adanya ketersediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah dipahami serta diakses para pemangku kepentingan oleh setiap perusahaan. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif dalam pengungkapan, tidak hanya masalah yang dalam hal ini disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga hal yang dinilai penting untuk pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Merupakan satu prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Oleh karenanya, perusahaan harus dikelola secara terukur, benar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Setiap perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat

dan lingkungan sehingga dapat terjaga kelanjutan bisnis dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) Independensi (*Independency*)

Setiap perusahaan dituntut untuk mengelola perusahaannya secara independen atau dalam hal ini tiap-tiap organ perusahaan tidak saling memerintah dan tidak dapat diinterferensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melangsungkan kegiatan usahanya, setiap perusahaan diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

4. Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance

Penelitian ini menggunakan mekanisme *good corporate governance* yang diwakili oleh kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagnean. Berikut penjelasan yaitu :

A. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (direktur, manajer atau komisaris) dan merupakan pihak yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Kepemilikan manajer ini sering dikaitkan dalam upaya peningkatan pada nilai perusahaan dalam hal ini dikarenakan manajer bukan hanya pihak manajemen dari perusahaan namun sekaligus berperan sebagai pemilik perusahaan atas kepemilikan sahamnya tersebut yang akan merasakan langsung akibat dari pengambilan keputusan

sehingga manajer tidak akan melakukan tindakan yang menguntungkan pribadinya saja melainkan manajer akan bertindak untuk keberlanjutan perusahaan (Suastini et al., 2016).

Adanya kepemilikan saham oleh manajemen di dalam sebuah perusahaan dapat menimbulkan asumsi yang menarik yakni nilai perusahaan dapat meningkat sebagai akibat dari kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang meningkat. Oleh karenanya, kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang besar ini akan efektif dalam memonitoring aktivitas di dalam perusahaan (Dewi & Sanica, 2017). Kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau manajer yang sekaligus berperan sebagai pemilik perusahaan ini akan selalu berupaya melindungi seluruh hak para investor. Dalam hal tersebut manajer senantiasa akan menanggung segala risikonya seperti contoh kerugian apabila perusahaan tersebut melakukan *fraud*, hal ini dapat membuat manajer lebih termotivasi dalam meningkatkan nilai perusahaan (Febrianti, 2019).

B. Kepemilikan Institusional

Menurut (Widianingsih, 2018) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham institusi/lembaga keuangan non bank pada perusahaan yang dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola dana atas orang lain atau para pemegang saham.

Menurut Silfiani (2018) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi/lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan keuangan dan bank. Arti penting dari kepemilikan institusional ada dalam memonitor manajemen yang dalam hal ini dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut dapat menjamin kemakmuran para

pemegang saham, serta kepemilikan institusi ini berperan sebagai agen pengawas melalui investasi mereka yang cukup besar di dalam pasar modal.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti perusahaan pensiun, asuransi, perusahaan investasi dan institusi atau lembaga lain yang dapat meminimalisir pengaruh yang tidak baik dari kepentingan lain di dalam perusahaan seperti kepentingan pribadi manajer dengan pemegang hutang (*debtholders*) (Permatasari & Yuliandari, 2019).

C. Komite Audit

Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015) sejumlah anggota komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan dibentuk oleh Dewan Komisaris disebut Komite Audit. Jumlah dari Komite Audit yaitu paling sedikit tiga orang anggota, dalam hal ini komite audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar perusahaan publik.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Effendi (2016) komite audit adalah komite yang melaksanakan pekerjaannya secara independent dan professional yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga dengan demikian tugas dari komite audit ialah memperkuat dan membantu fungsi dewan komisaris atau dalam hal ini sebagai dewan pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen resiko dan implementasi dari *good corporate governance* pada tiap-tiap perusahaan.

Komite audit juga dapat berperan penting di dalam menjamin terciptanya *Good Corporate Governance*. Komite audit bertugas sebagai pemberi masukan profesional yang independent kepada dewan komisaris terhadap laporan atau setiap hal yang disampaikan oleh pihak direksi kepada dewan komisaris serta mengawasi setiap hal yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris (Febrianti, 2019). Sehingga keberadaan dari anggota komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya *fraud* atau manipulasi dalam informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan (Effendi, 2016).

D.Dewan Komisaris Independen

Menurut (Zahra et al., 2018) komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris atau direksi lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bekerja secara independen.

Dewan komisaris independen berperan sebagai pengawas di dalam perusahaan atas kinerja perusahaan tersebut. Dewan komisaris independen yang dalam hal ini merupakan penyelenggara dari pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris yang efektif dapat meningkatkan standar kinerja dari manajemen di dalam perusahaan sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan (Febrianti, 2019). Menurut A.S. Dewi et al., (2018) dewan komisaris

ialah orang yang fundamental dalam menjalankan dan mengawasi sistem tata kelola yang diterapkan dalam perusahaan.

Inti dari penerapan mekanisme *good corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin dalam pelaksanaan strategi dari perusahaan, mewajibkan terlaksananya akuntabilitas ialah dewan komisaris. Dalam hal ini, dewan komisaris juga dapat didefinisikan sebagai pusat dari kesuksesan dan ketahanan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris juga dapat dibantu oleh komite audit, karena mengingat tugas dari dewan komisaris sebagai pengawas dari jalannya perusahaan cukup berat (Syafitri, 2016).

2.3 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan (*firm value*) memegang peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan, karena dapat membangun kinerja dalam upaya menumbuhkan keyakinan terhadap para pengguna informasi serta masyarakat yang berkepentingan (Efriyenti, 2018). Nilai perusahaan pada perusahaan terbuka akan tampak dalam harga pasar saham perusahaan (Dirawati Pohan & Dwimulyani, 2017). Dalam hal tersebut, nilai perusahaan di mata publik akan meningkat sehingga investor dapat lebih berani membayar premium untuk *market value* dari saham yang beredar di pasar (Sadeli, 2017).

Menurut Sulasri, *et al.*, (2019) indikator untuk mengukur Nilai Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. *Price to Book Value* (PBV) yakni rasio perbandingan hasil perhitungan harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Menurut Mufidah & Purnamasari (2018) tingginya nilai PBV dapat menarik para investor untuk menanamkan sahamnya, fungsi utama PBV yaitu :

- a. PBV mampu mencerminkan saham suatu perusahaan saat diperdagangkan pada harga yang mahal dipasar, baik pada harga yang masih murah, ataupun pada harga wajar berdasarkan riwayat rata-ratanya.
- b. PBV dapat membantu menentukan mahal atau murahnya suatu saham berdasarkan estimasi harga wajar untuk periode satu tahun kedepan.

2. *Price Earning Ratio* (PER) yakni rasio yang mengukur besaran perbandingan antara harga saham pada perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham.

3. *Tobin's Q* yakni rasio yang dikembangkan oleh James Tobins pada tahun 1967, apabila rasio Q bernilai diatas 1 maka menunjukkan investasi dalam aktiva dapat menghasilkan laba yang memberikan nilai yang menunjukkan lebih tinggi daripada pengeluaran pada investasi, yang dalam hal ini dapat menarik investasi baru. Namun jika rasio Q bernilai dibawah 1 maka investasi dalam aktiva dikatakan tidak dapat menarik investor.

2.4 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu terkait dengan nilai perusahaan, dapat dilihat pada

Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	(Bheri et al., 2017)	Metode analisis regresi linear berganda	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang terdiri dari jumlah dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, dan jumlah komite audit secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan secara parsial, menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh negative, dewan direksi berpengaruh positif, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan <i>Price to Book Value</i> pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015	(Dinar Nurfaza et al., 2017)	Metode purposive sampling	secara parsial maupun simultan tiga indikator <i>Good Corporate Governance</i> yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3	pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang diukur dari laporan <i>self assessment</i> GCG bank yang mempublikasikan <i>composite index good corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015	(Oktaryani et al., 2021)	Metode analisis data panel regresi linear berganda	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan dan profitabilitas ROA berpengaruh positif namun ROE berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan perbankan

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dengan indikator kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan (<i>Tobin's Q</i>) pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.	(Poluan & Wicaksono, 2019)	Metode analisis regresi linear berganda	2 dari 4 variabel <i>Good Corporate Governance</i> yaitu Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun Komite Audit memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 2 variabel lainnya yaitu kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dengan variabel Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan Industri sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016	(Syafitri, 2016)	analisis regresi linear berganda, uji f dan uji t.	secara parsial Komite Audit dan Dewan Direksi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan, namun Dewan Komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap Nilai perusahaan. Sedangkan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan secara parsial.
6	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> pada nilai perusahaan baik perusahaan kecil, menengah maupun besar, yang telah terdaftar di Bursa Efek Pakistan pada tahun 2003-2014.	(Gul et al., 2016)	Pengujian statistik deskriptif, analisis korelasi dan regresi estimasi data panel, serta pengujian hipotesis	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan secara ekonomi dan <i>statistic</i> untuk ketiga kelompok perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan periode 2003-2014.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> pada kinerja dan nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Saudi. Metoda penelitian ini adalah data yang dikumpulkan di Bursa Efek Saudi (TADAUWL) pada tahun 2012-2014.	(Buallay et al., 2017)	ROA, ROE dan <i>Tobin's Q</i> (Untuk mengukur kinerja keuangan)	Nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan pemegang saham terbesar dan independensi dewan direksi perusahaan. Pengaruh yang signifikan ditemukan untuk kepemilikan tiga besar dan ukuran Dewan Direksi pada kinerja perusahaan.
8	Hubungan <i>Good Corporate Governance</i> dan kinerja perusahaan serta nilai perusahaan yang diukur dengan <i>Return on asset</i> , <i>Return on equity</i> , dan <i>Tobin's Q</i> .	(Javaid & Saboor, 2021)	Metode pengujian statistik deskriptif, analisis korelasi dan regresi estimasi, serta pengujian hipotesis.	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Listing di BEI	(Alfinur, 2016)	Metode analisis regresi linear berganda	Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
10	Pengaruh Good Corporate Governance dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan LQ45	(Kumalasari & Widyawati, 2021)	Metode analisis regresi linear berganda	Dewan komisaris independen positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
11	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan	(Sondokan et al., 2019)	Metode analisis regresi linear berganda	Dewan komisaris independen positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negative

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
12	Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan	(Wardani & Zulkifli, 2017)	Metode analisis regresi linear berganda	Kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
13	Pengaruh Economic Value Added, Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Return on Assets Terhadap Nilai Perusahaan	(Wedayanthi & Darmayanti, 2016)	Metode analisis regresi linier berganda	Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan
14	The Influence of Good Corporate Governance on Firm Value, Empirical Study of Companies Listed in IDX30 Index Within 2013- 2017 Period	(Gosal et al., 2018)	Metode analisis regresi linier berganda	Kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
15	Cash Holding, Good Corporate Governance and Firm Value	(Nisasmara & Musdholifah, 2016)	Metode analisis regresi linier berganda	Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin optimal dewan komisaris independen, semakin tinggi nilai perusahaan.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan saham atas manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan diantara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan saham atas manajer dapat memicu manajer yang turut merasakan manfaat dan dampak kerugian apabila pengambilan keputusan salah. Oleh karenanya, memerlukan suatu sistem pengendalian yang dapat menyeimbangkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajer yang sekaligus berperan penting sebagai pemegang saham akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan karena itu dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai kekayaan manajer tersebut sebagai pemegang saham akan meningkat juga (Astriani, 2014).

Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana dengan peningkatan kepemilikan manajerial maka perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menambah nilai perusahaan (Anita & Yulianto, 2014). Semakin tingginya jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*), sehingga dapat meminimalkan konflik agensi serta mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (investor) untuk dapat menikmati keuntungan, motivasi manajemen juga akan meningkat atau lebih menstimulasi kinerjanya untuk memaksimalkan kepentingan manajemen maupun pemegang saham, hal tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Widianingsih, 2018).

Para investor atau yang menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan juga memandang proporsi kepemilikan saham oleh manajerial merupakan acuan

atau sebagai sinyal yang baik dalam peningkatan nilai perusahaan (Sasurya & Asandimitra, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 :Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut (Widianingsih, 2018)Tingkat kepemilikan institusional dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yang dimana apabila tingkat kepemilikan institusional semakin tinggi maka tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal akan semakin kuat terhadap perusahaan sehingga biaya keagenan yang terjadi di dalam perusahaan akan berkurang seiring peningkatan kepemilikan saham oleh institusi tersebut dan nilai perusahaan juga dapat semakin meningkat. Kepemilikan institusional atau dalam hal ini merupakan kepemilikan saham atas institusi memiliki arti penting dalam mengawasi (*monitoring*) manajemen, karena dengan adanya kepemilikan saham atas institusi tersebut dapat membantu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Candradewi & Sedana, 2016)Sebuah sistem pengawasan (*monitoring*) oleh pihak institusi akan menuntut manajemen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan menjamin peningkatan kemakmuran para pemegang saham (Warapsari & Suaryana, 2016).

Hasil menunjukan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Setiap kenaikan kepemilikan institusional akan meningkat nilai perusahaan. Kenaikan tersebut mampu membatasi perilaku *opportunistic* para manajer. Dengan adanya kepemilikan institusional, pihak institusi dapat melakukan pengawasan operasional (Poluan & Wicaksono, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lestari, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berhasil meningkatkan nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Adanya anggota komite audit dapat bermanfaat untuk menjamin keterbukaan laporan keuangan, transparansi, keadilan untuk semua pemegang saham, dan pengungkapan seluruh informasi yang dilakukan oleh manajemen (Indrasari *et al.*, 2017). (Sarafina & Saifi, 2017) menyatakan bahwa komite audit memberikan kontribusi atau ikut serta dalam kualitas pelaporan keuangan. Semakin tinggi efektivitas dari komite audit maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Pendapat lain dikemukakan bahwa komite audit juga dapat membantu memonitoring atau mengawasi dari mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi dan manajemen perusahaan sehingga secara impulsif nilai perusahaan akan meningkatkan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Valensia & Khairani, 2019).

Hasil penelitian (Mayangsari, 2018) menunjukkan adanya komite audit mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan atau *firm value*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan teori keagenan. Keberadaan dari komite audit dapat menurunkan tingkat penyelewengan atau *fraud* dan kelalaian yang dilakukan oleh direktur beserta komisaris perusahaan sehingga akan berdampak pada kinerja

perusahaan dan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Dahlia (2018) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak ada hubungannya dengan pihak manapun baik itu dari manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak memihak pada orang lain atau independen. Pendapat lain dikemukakan oleh Rachmania (2017) bahwa komisaris independen mencerminkan puncak dari mekanisme pengendalian pada perusahaan. Peran pengawasan (*monitoring*) oleh dewan komisaris ini diharapkan akan meminimalisir *agency conflict* yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Dengan adanya komisaris independen juga diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan.

Besaran jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan yang tinggi, diharapkan dapat melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi secara efektif (Salafudin, 2016).Oleh karenanya, adanya komisaris independen diharapkan dapat memicu manajemen untuk bekerja lebih baik sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau meningkatnya nilai perusahaan (Salafudin, 2016).Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif pada komisaris independen terhadap nilai perusahaan, itu disebabkan komisaris

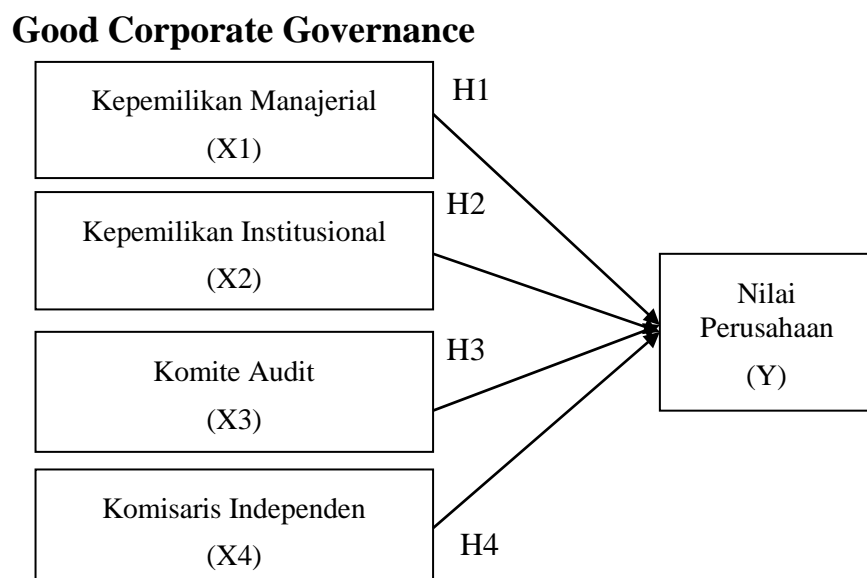
independen yang mempunyai misi untuk mendorong terciptanya keadaan yang lebih objektif dan menempatkan kesejajaran diantara berbagai relevansi termasuk relevansi perusahaan dan *stakeholder* sebagai tujuan utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Hal ini dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Widianingsih, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H4 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran